

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Chandra, S. 2005. *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT.Gramedia
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia) Jilid I*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bangung: PT. Refika Aditama.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Jayadi, Setiabudi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, Jakarta: PT. Suka Buku.
- Meliala, Djaja S. 2008. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moerasad, M. 1997. *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Notodisoerjo, Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Santoso, Lukman. 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soepratignja, Paulus J. 2012, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Soerjowinoto, Petrus. 2006. *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) & Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Sutedi, Adrian. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Sertifikat Hal Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tengker, Freddy. 2012. *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab ke Enam Belas tentang Pemberian Kuasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/bangunan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang Menyangkut Aset dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban dalam Restrukturisasi yang Berupa Hak atas Tanah yang Sudah Bersrtifikat dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

C. Internet

http://www.academia.edu/5473437/Pengertian_dan_ruang_lingkup_hukum_agraria, diakses pada tanggal 16-03-2015, pukul 18.55.

<http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=3044&file=/Perantara-Dagang.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2015, jam 19.58.

D. Jurnal

Ronny Utama, Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Notariil Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Satu Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah, Jurnal Magister pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang: tidak diterbitkan.

Marsha Novita Purwitasari, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kota Semarang, Jurnal Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Tidak diterbitkan.